

# DRIYARUKARA

Th. XXXI no. 1 / 2010

JURNAL FILSAFAT



## ALAM PIKIRAN INDONESIA

ISSN: 0216-0243

JURNAL FILSAFAT

DRIYARUKARA

ALAM PIKIRAN INDOENSIA

# DAFTAR ISI JURNAL DRIYARKARA

## Alam Pikir Indonesia

### **Tenggelamnya Pancasila**

Gerardus Hadian Panamokta ..... 3

### **Mencari Eksistensi Manusia: Sebuah Tanggapan Driyarkara terhadap “Kritik terhadap Publik” Kierkegaard**

L. Kristianto Nugraha ..... 13

### **Sebuah Pemahaman Mengenai Etika Jawa**

Clarimundo Castelo Gusmao ..... 27

### **Prinsip Kerukunan dan Prinsip Hormat dalam Etika Jawa**

Mateus Lesnanto ..... 35

### **Menerawang Falsafah Jawa**

..... 43

### **Surat dari Rawasari**

Binhad Nurrohmat ..... 61

### **Politik Keselarasan: Membaca Ulang “Etika Jawa”**

Trisno S. Sutanto ..... 65

## Artikel Lepas

### **Di Hadapan ‘Wanita’ (?): Sebuah Pemikiran Nietzsche mengenai Kebenaran**

Nikolas Kristiyanto ..... 73

### **Zarathustra Berkata, “Saya Orang Gila.”**

Leslie Joseph Bingkasan ..... 81

# PRINSIP KERUKUNAN DAN PRINSIP HORMAT DALAM ETIKA JAWA

Mateus Lesnanto\*

**Abstrak:** Masyarakat Jawa berada dalam sejarah. Mereka mengalami transformasi dari generasi ke generasi. Meski demikian, ada prinsip-prinsip tetap yang dipelihara dan diwariskan turun temurun. Dua prinsip, yakni prinsip kerukunan dan prinsip hormat, diajarkan dalam keluarga dan dipraktikkan lewat pergaulan dalam masyarakat. Etika Jawa juga ditopang oleh *rasa* sebagai pengetahuan terdalam. Tantangan muncul ketika masyarakat Jawa bertemu dengan etika masyarakat di luar Jawa, terutama etika Barat. Masyarakat Jawa berusaha memasukkan nilai-nilai yang bisa diterima dengan tetap mempertahankan identitasnya sebagai orang Jawa.

**Kata-kata Kunci:** Orang Jawa, masyarakat Jawa, etika Jawa, prinsip kerukunan, prinsip hormat, etika keselarasan, *rasa*.

## SIAPAKAH ORANG JAWA?

Setiap masyarakat memiliki *pattern* budaya dan menghidupi norma-norma moral tertentu. Masyarakat Jawa pun demikian. Lalu, apa itu masyarakat Jawa dan Etika Jawa<sup>1</sup>?

Sebelum menjelaskan tentang masyarakat dan etika Jawa, saya akan memberi sedikit ilustrasi. Kakek dan nenek dari keluarga ibu saya memeluk agama Islam ketika usia sudah senja, sementara kakek dan nenek dari pihak bapak memeluk agama Katolik juga ketika usia mereka sudah mulai senja. Bapak dan Ibu saya memeluk agama Katolik ketika mereka berdua sudah dewasa, sementara saya sendiri telah memeluk agama Katolik sejak kecil karena baptisan. Siapa dari mereka yang merupakan orang Jawa? Kakek-nenek saya tetap disebut sebagai orang Jawa, Bapak dan Ibu juga tetap disebut orang Jawa, saya juga disebut orang Jawa, bahkan sepupu saya yang bekerja di Amerika juga tetap disebut sebagai orang Jawa.

Lantas, bila demikian apakah orang Jawa adalah mereka yang hidup di pulau Jawa? Ataukah mereka yang memiliki nilai-nilai kejawaan? Saya akan mengikuti apa yang Magnis sebutkan sebagai orang Jawa dan etika Jawa. Orang Jawa dan etika Jawa dikonstruksikan secara teoretis oleh Magnis sebagai salah satu kasa acuan untuk memahami masyarakat Jawa.<sup>2</sup> Orang

Jawa dan etika Jawa tidak dimaksudkan untuk menunjuk langsung pada masyarakat Jawa yang nyata-nyata ada, atau pernah ada, atau untuk sebagian ada. Orang Jawa dan etika Jawa yang dimaksudkan oleh Magnis merupakan tipos ideal, yakni titik acuan atau tantangan.<sup>3</sup> Tipos ideal orang Jawa dan etika Jawa didasarkan pada studi dan interpretasi data-data oleh Magnis atas kepustakaan antropologi, sosiologi dan disiplin ilmu-ilmu yang lain tentang masyarakat Jawa. Etika Jawa merupakan moralitas masyarakat Jawa yang dirumuskan dengan logika sistematis. Etika Jawa berusaha menjelaskan sistem moralitas khas Jawa meski tidak secara eksklusif. Etika Jawa disebut etika keselarasan karena nilai tertingginya adalah keselarasan.

Sebagai orang yang dibesarkan dalam kultur Jawa, saya menemukan beberapa *pattern cultural* dan etika normatif yang menjadi dunia kehidupan (*Lebenswelt*)<sup>4</sup> Jawa. Saya mengalami dan berada di dalam budaya Jawa. Selain mencoba mengamini apa yang ditemukan dan dituliskan oleh Magnis, dalam tulisan ini saya juga mesti belajar untuk mengambil jarak dan berefleksi atas apa yang telah tertanam dalam diri pribadi sebagai orang Jawa.

Saya, dalam paper ini, memfokuskan diri pada prinsip kerukunan dan prinsip hormat dalam etika Jawa. Uraian akan dimulai dengan prinsip kerukunan, dilanjutkan dengan prinsip hormat. Karena *rasa* dalam etika Jawa memainkan peran yang penting, maka *rasa* juga akan saya elaborasi. Sebagai penutup, saya memberikan tanggapan kritis.

## PRINSIP KERUKUNAN

Ada dua akidah dalam masyarakat Jawa menurut Hildred Geertz<sup>5</sup> yang paling menentukan pola pergaulan masyarakat Jawa; *pertama*, manusia hendaknya dalam setiap situasi bersikap sedemikian rupa hingga tidak menimbulkan konflik, *kedua*, manusia hendaknya dalam bicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya.

Rukun dalam masyarakat Jawa dipahami sebagai “berada dalam keadaan selaras”, “tenang dan tenteram”, “tanpa perselisihan dan pertentangan”, “bermaksud dalam maksud untuk saling membantu”.<sup>6</sup> Prinsip kerukunan masyarakat Jawa –meminjam terminologi istilah Ann R. Willner– adalah prinsip pencegahan konflik.<sup>7</sup>

Rukun mesti dipahami pertama-tama bukan sebagai sikap batin melainkan lebih merupakan penjagaan keselarasan dalam pergaulan. Relasi-relasi yang kentara diatur sehingga tidak terjadi konflik terbuka. Ciri ini disebut oleh Hildred Geertz sebagai *harmonious social appearances*.<sup>8</sup>

Masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi keselarasan hidup bersama juga memperhatikan keselarasan hidup individual. Bila ada berita atau hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap seseorang, umumnya akan disampaikan oleh seorang Jawa dalam bahasa yang sangat halus. Orang Jawa lebih memilih untuk tidak menyatakan penolakan secara langsung. Orang Jawa dituntut untuk mampu membaca

ungkapan-ungkapan secara tersamar dengan baik. Misalnya, orang yang ingin menolak sesuatu tidak menyatakannya dengan penolakan langsung. Mereka akan mengatakan “*nggib*” (ya) yang masih dapat merupakan tanda yang ambivalen. Bisa saja ini merupakan penolakan secara halus. Hal ini dilakukan sebagai suatu sikap untuk menjaga keselarasan dan supaya tidak menimbulkan rasa tidak enak. Untuk mencegah rasa kecewa orang Jawa menggunakan sikap *ethok-ethok*<sup>9</sup>. *Ethok-ethok* ini bernilai seni tinggi dan positif. Ini berlaku bagi perasaan-perasaan negatif. Orang Jawa diharapkan dapat memahami sikap *ethok-ethok* sehingga dapat menangkap maksud dari sikap orang yang bersangkutan.

Kerukunan dalam tingkat desa diwujudkan dalam *rembug desa* dan gotong royong (*gugur gunung*). Penolakan di dalam “*rembug desa*” diungkapkan orang Jawa dengan simbol-simbol atau sindiran. Simbol-simbol dan sindiran ini harusnya sudah dapat dipahami oleh semua peserta *rembug desa*. Dalam tingkat individu, gotong royong diwujudkan dalam saling membantu pekerjaan seseorang (*game*) dan kerja bakti pekerjaan untuk kepentingan bersama.

Kerukunan memiliki dua dimensi. Dimensi pertama merupakan dimensi sosial, yakni bahwa kerukunan merupakan represi oleh masyarakat. Artinya, kerukunan dipaksakan oleh masyarakat sehingga orang wajib untuk mematuhiinya. Dimensi kedua merupakan dimensi personal, yakni bahwa kerukunan merupakan sikap seseorang untuk menyesuaikan dengan kepentingan keselarasan masyarakat. Kerukunan merupakan sikap yang harus dijaga dan dibatinkan di dalam diri seorang Jawa.

Etika membedakan antara prinsip-prinsip moral dan prinsip-prinsip penata masyarakat. Prinsip-prinsip moral merupakan sikap-sikap batin yang memang harus terwujud dalam tindakan lahiriah, sementara prinsip-prinsip penata masyarakat merupakan norma-norma kelakuan yang sepenuhnya dituntut dan seperlunya dipaksakan oleh masyarakat, entah apapun keadaan batin seseorang. Prinsip-prinsip penata masyarakat idealnya merupakan perwujudan dari sikap batin yang dituntut. Prinsip kerukunan merupakan prinsip penata sosial dan bukan prinsip moral, karena prinsip kerukunan merupakan suatu mekanisme sosial untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan demi kesejahteraan kelompok.

## PRINSIP HORMAT

Prinsip hormat adalah sikap setiap orang dalam cara dan pembawaan diri di mana ia harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Masyarakat Jawa mengorganisasikan dirinya dalam hirarki yang bertingkat. Hubungan masyarakat teratur secara hirarkis bernilai pada dirinya sendiri sehingga orang memiliki kewajiban mempertahankannya. Masyarakat Jawa diresapi oleh kesadaran akan kedudukan sosial. Dalam setiap percakapan, orang mesti mampu menafsirkan kedudukannya dan kedudukan lawan bicaranya. Unsur yang paling mencolok adalah penempatan dalam kerangka se-

nior-yunior (ukuran senior-yunior tidak hanya diukur berdasarkan umur melainkan jenis ikatan kekerabatan).<sup>10</sup> Hildred Geertz, sehubungan dengan kecenderungan penempatan diri orang Jawa dalam percakapan, menemukan bahwa orang Jawa akan mengambil posisinya. Orang Jawa akan bertanya pada dirinya, “Tingkat kehormatan mana yang saya harus tunjukkan kepadanya?”<sup>11</sup>

Hal ini terlihat jelas dalam penggunaan Bahasa Jawa. Bahasa Jawa dengan sendirinya menempatkan orang dalam posisinya. Bahasa Jawa memiliki dua tingkat berbeda dalam kata dan gramatika; yakni *krāmā* dan *ngoko*. *Krāmā* dan *krāmā inggil* merupakan bentuk ungkapan hormat, sementara penggunaan *ngoko* menunjukkan ungkapan keakraban. Bahasa Jawa memiliki sebelas kombinasi tingkat bahasa yang berbeda dari ketiga jenis kata yang digunakan.

Sikap hormat diperkenalkan dan diajarkan lewat keluarga. Hildred Geertz meneliti tiga tahap pendidikan perasaan dalam keluarga Jawa: *wedi*, *isin*, dan *sungkan*.<sup>12</sup> *Wedi* (*takut*) adalah reaksi terhadap ancaman fisik maupun sebagai rasa takut terhadap akibat kurang enak suatu tindakan. Biasanya pendidikan *wedi* terjadi dalam masa balita (bawah lima tahun). Keluarga menjadi sentral yang memberikan rasa aman dalam anak kecil sehingga keluarga merupakan sentral rasa aman. *Isin* (malu) berarti malu-malu, merasa bersalah, dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa *isin* adalah langkah awal menjadi pribadi Jawa yang matang. *Sungkan* merupakan perasaan yang dekat dengan *isin*. Rasa *sungkan* merupakan “rasa hormat yang sopan terhadap atasan atau sesama yang belum dikenal”<sup>13</sup>, atau “sebagai pengekangan halus terhadap kepribadian sendiri demi hormat terhadap pribadi lain”<sup>14</sup>. *Wedi*, *isin*, dan *sungkan* merupakan suatu kesinambungan perasaan-perasaan yang mempunyai fungsi sosial untuk memberi dukungan psikologis terhadap prinsip-prinsip hormat.<sup>15</sup>

Magnis berpendapat bahwa kendati prinsip ini setara dengan prinsip kerukunan, prinsip hormat bukanlah sikap batin. Prinsip hormat lebih merupakan prinsip penata masyarakat (kelakuan dalam masyarakat).

## ETIKA KESELARASAN

Prinsip kerukunan dan prinsip hormat mengatur interaksi-interaksi orang Jawa. Prinsip kerukunan mengatur semua bentuk pengambilan keputusan antara pihak-pihak yang sama kedudukannya, sementara prinsip hormat menentukan hubungan hierarkis dan dengan demikian menetapkan kerangka bagi segala macam interaksi. Interaksi-interaksi dapat berjalan secara teratur jika setiap pihak mempunyai tempatnya yang diakui dan mengetahui bagaimana dirinya harus bersikap. Maka prinsip kerukunan dan prinsip hormat merupakan prinsip keselarasan. Prinsip keselarasan mengalahkan prinsip regulatif yang lain. Etika keselarasan unggul atas etika hukum positif (meski dalam hal ini terjadi pergeseran-pergeseran).

Kekuatan etika keselarasan adalah bahwa ia sudah ada sebagai kenyataan sosiologis. Implikasi dari etika keselarasan mensyaratkan kepada individu agar mempertimbangkan tindakannya dengan titik acuan supaya keselarasan tetap terjaga.

Kesadaran individu tidak boleh dimutlakan sehingga diperlukan pengekanan terhadap emosi-emosi pribadi.

Titik penting yang seringkali menjadi diskusi hangat adalah ketika etika keselarasan dihadapkan dengan otonomi moral. Persoalannya adalah apakah seseorang berkewajiban untuk mengatakan apa yang benar sesuai dengan hati nuraninya ataukah mesti menjaga keselarasan masyarakat. Magnis mencontohkan pertimbangan-pertimbangan pada kasus Lurah Desa yang melakukan korupsi: perlu dibongkar atau tidak, ataukah ada potensi konflik horizontal ketika lurah dilaporkan.<sup>16</sup>

Prinsip keselarasan bukanlah norma dasar. Prinsip keselarasan tidak mendasari norma-norma dasar lain, misalnya keadilan, kejujuran, kesetiaan, kebaikan, dll. Prinsip keselarasan tidak dapat dilihat dari dalam, artinya dari kehendak, melainkan mesti dilihat sebagai interaksi tertentu. Prinsip kerukunan dalam arti ini menegaskan bahwa apapun motivasi dan kehendak seseorang tidak penting. Yang terpenting adalah seseorang mencegah terjadinya konflik terbuka. Sementara itu, prinsip hormat menuntut agar orang memperhatikan kedudukan orang lain, apapun kehendak yang melatarbelakanginya. Prinsip keselarasan bukanlah prinsip moral karena yang dituntut bukanlah sikap batin tertentu, melainkan bagaimana orang harus berkelakuan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Segi moral etika keselarasan terletak pada sikap masyarakat Jawa yang tidak setuju kalau orang berdasarkan pertimbangannya sendiri, tidak bertindak berdasarkan dua prinsip tersebut. Keselarasan dalam masyarakat Jawa juga berarti keselarasan antara *jagad gedhe* dan *jagad cilik*, antara makrokosmos dan mikrokosmos, atau antara alam raya dengan manusia. Semua ada dalam tatanan dan ordinatnya masing-masing.

## **RASA**<sup>18</sup>

*Rasa*, dalam etika Jawa memainkan peran yang sangat penting. *Rasa* memiliki dua arti pokok, yakni perasaan (*feeling*) dan makna (*meaning*).<sup>19</sup> Olah *rasa* dalam budaya Jawa, seperti diteliti oleh Hildred Geertz, diajarkan dalam keluarga sejak dini. Semakin seseorang memiliki *rasa* yang halus maka dia disebut *Jawa tenan* atau bagi orang yang bukan Jawa disebut “telah *ñJawani*”.

Sebagai perasaan, *rasa* adalah salah satu dari panca indera: melihat, mendengar, berbicara, membaui, dan merasakan. Cita-rasa pisang adalah *rasanya* pisang, firasat adalah *rasa*, kesakitan adalah *rasa*, dan nafsu juga adalah *rasa*. *Rasa* dalam arti makna adalah makna terakhir, yakni makna terdalam yang dapat dicapai orang. *Rasa* berarti sebagai pengetahuan atau pengertian.<sup>20</sup>

Masyarakat Jawa menerapkan prinsip keselarasan yang diresapi oleh penghayatan keutamaan-keutamaan yang berakar pada *rasa*. Clifford Geertz berpendapat bahwa etika Jawa dipusatkan pada afeksi tanpa menjadi hedonistis.<sup>21</sup> Orang harus mengatasi emosi-emosi kehidupan sehari-hari agar sampai pada makna-perasaan (*feeling-meaning*) sejati yang terletak dalam dirinya.

## TANGGAPAN KRITIS

Etika Jawa dengan penekanan keselarasan memiliki akar kuat dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa masyarakat harmonis sudah ada dalam masyarakat Jawa.

Masyarakat Jawa perlu mencermati dan memperhatikan praktik etika keselarasan. Dalam hal ini, perlu diajukan apakah dalam praktik ada kecenderungan untuk memutlakkan atau tidak.

Memutlakkan etika keselarasan berarti membuat otonomi moral individu kehilangan fungsinya. Suara hati dan hati nurani ditekan, bahkan bisa sampai “mati”, demi kepentingan keselarasan masyarakat. Bila ternyata suara hati mengatakan kebenaran sementara suara bersama masyarakat jelas-jelas salah, tentu dapat mengakibatkan dilema moral. Implikasi lebih jauh adalah subjek yang telah mencapai kedalaman pengertian diri tidak akan mampu merealisasikan apa yang disuarakan oleh hatinya.

Masyarakat Jawa telah bertemu dengan norma-norma dan etika yang dibawa dari luar. Masyarakat Jawa yang terbuka membuat setiap nilai yang datang dijawakan. Meski demikian, etika Jawa tetap mengalami beberapa transformasi. Ada Islam Jawa, Katolik Jawa, dan nama-nama Jawa yang lain. Meski demikian, prinsip keselarasan tetap memainkan peran penting meski prinsip ini bertemu dengan berbagai aliran tema-tema etika lain.<sup>22</sup>

Etika keselarasan Jawa dengan prinsip-prinsipnya tetap terbuka terhadap norma moral lain. Perubahan pengetahuan<sup>23</sup> pada *rasa* juga memainkan peran penting dalam menstransformasi etika Jawa. Generasi demi generasi mewarisi intuisi norma Jawa, meski demikian etika Jawa tetap berhadapan dengan perubahan dan pergeseran pemikiran (ilmu pengetahuan).

*Rasa* sebagai pengertian tidak lagi berdimensi subjektif tunggal. *Rasa* juga mengalami transformasi terutama lewat pendidikan sekolah-sekolah formal gaya barat. Ada pemisahan antara pengetahuan kognitif dan pengetahuan afektif-intuitif. Pendidikan *rasa* dalam keluarga bertemu dengan pendidikan kognitif di sekolah. Maka, muncullah generasi baru dengan memisahkan pengetahuan kognitif dan pengetahuan intuitif. Generasi baru yang merupakan generasi *hybrid*. Lahirlah, generasi dengan intuisi Jawa dan pengetahuan Barat.

Akhirnya dengan mencermati telaah di atas, pertanyaan yang pada awal saya kemukakan telah terjawab. Generasi kakek-nenek, bapak-ibu, maupun generasi diri saya, semuanya adalah orang Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa dan etika Jawa dinamis terhadap waktu dan statis terhadap prinsip. Etika Jawa dan masyarakat Jawa sebagai tipos ideal tetaplah ada. Hanya bentuk dan artikulasinya yang berbeda.

---

## Catatan Akhir

- \* Mahasiswa Program Sarjana Filsafat STF Driyarkara.
- <sup>1</sup> Magnis membuat kajian filosofis tentang Etika Jawa dalam bukunya *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988), dan dalam tulisan ini saya mengikuti apa yang beliau tulis dalam bukunya.
  - <sup>2</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988), 5.
  - <sup>3</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa*, 4.
  - <sup>4</sup> Konteks kehidupan nyata yang selalu sudah menjadi tempat segala macam penilaian kita berkembang. Franz Magnis-Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 50.
  - <sup>5</sup> Hildred Geertz, *The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization* (Ithaca: The Free Press of Glencoe, 1961), 146, sebagaimana dikutip dalam Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa*, 38.
  - <sup>6</sup> Niels Mulder, *Mysticism and Everyday Life in Contemporary Java: Cultural Persistence and Change* (Singapore: Singapore University Press, 1978), sebagaimana dikutip dalam Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa*, 39.
  - <sup>7</sup> Ann R. Willner, "The Neotraditional Accommodation to Independence: The Case of Indonesia", dalam *Pye* 1970, 242-306, sebagaimana dikutip dalam Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa*, 40.
  - <sup>8</sup> Geertz, *The Javanese Family*, sebagaimana dikutip dalam Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa*, 40.
  - <sup>9</sup> Sikap seseorang yang tidak akan menunjukkan perasaan-perasaannya yang sebenarnya di luar keluarga inti, contohnya meski sedang sedih orang harus tetap tersenyum di depan orang umum. Lih. Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa*, 43.
  - <sup>10</sup> Orang dewasa bisa memanggil anak kecil sebagai om/tante karena bila diurutkan dalam pohon keluarga memang demikian.
  - <sup>11</sup> Geertz, *The Javanese Family*, sebagaimana dikutip dalam Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa*, 62.
  - <sup>12</sup> Geertz, *The Javanese Family*, sebagaimana dikutip dalam Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa*, 63.
  - <sup>13</sup> Geertz, *The Javanese Family*, sebagaimana dikutip dalam Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa*, 65.
  - <sup>14</sup> Geertz, *The Javanese Family*, sebagaimana dikutip dalam Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa*, 65.
  - <sup>15</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa*, 65.
  - <sup>16</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa*, 75-76.
  - <sup>17</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa*, 80.
  - <sup>18</sup> *Rasa* dalam indeks tulisan Zoetmulder dalam *Manunggaling Kawula Gusti* yang menunjuk pada beberapa kutipan sastra suluk Jawa. Saya mencoba menerka dan mengira-ira maksud suluk tersebut. *Rasa* memiliki dua lapis arti; perasaan dan makna (yang dalam Magnis ditulis sebagai pengertian).
  - <sup>19</sup> Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, penerj. F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 61.
  - <sup>20</sup> Pengetahuan dan pengertian di sini bukan dalam arti subjek mengetahui objek (khas Barat) namun "mengerti" dipahami sebagai kemampuan memahami dengan cara masuk ke dalam dirinya sendiri dan sampai pada pengetahuan hakiki akan kehidupan yang bersifat subjektif. Lih. Franz Magnis Suseno, 1988, 196-203.
  - <sup>21</sup> Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, 62-63.
  - <sup>22</sup> Lih. Franz Magnis-Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, 15-53.
  - <sup>23</sup> Pengetahuan Barat di sini saya maksudkan pengetahuan dengan metode, sistem, dan logika Barat. Pengetahuan Barat memperkenalkan suara hati sebagai dasar pertimbangan moral dan berimplikasi pada penghormatan HAM.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Geertz, Clifford. 1992. *Kebudayaan dan Agama*. penerj. F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, Franz. 1988. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Magnis-Suseno, Franz. 1995. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, cetakan ke-4. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Magnis-Suseno, Franz. 2009. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mulyono, Sri. 1979. *Wayang dan Karakter Manusia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Mulder, Niels. 1996. *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Zoetmulder, P.J. 1990. *Manunggaling Kawula Gusti: Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa*. penerj. Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia.